



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 15-K/PM. III-17/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANUS SOVERIT SELAN**
Pangkat/NRP : Kopda/31060402780784
Jabatan : Siswa Diktuba Reg
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 31 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-33/A-13/XII/2019 tanggal 12 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/40/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Hal 1 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/15/PM. III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/15a/PM. III-17/AD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/15/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/15/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 2 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kelas Ahmad Yani Siswa Diktuba bulan April 2019 sampai dnegan bulan Juni 2019, No. urut 24 atas nama Julianus Soverit Selan, Kopda NRP 31060402780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansecaba, Arif Harianto, Letnan Kolonel Inf NRP 11000030680577, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2019/Idik tanggal 22 November 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 27 November 2019 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XIII/Mdk.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/132/IV/2020 tanggal 17 April 2020.

Hal 3 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado
Nomor B/48/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado
Nomor B/93/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danrem 133/Nwb telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danrem 133/Nwb Nomor B/885/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Kopda Julianus Soverit Selan NRP 31060402780784 Ta Provost Rem 133/Nwb (ex Siswa Diktuba Reg. TA. 2019) tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Mei 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Hal 4 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danrem 133/Nwb Nomor B/885/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang menyatakan Terdakwa a.n. Kopda Julianus Soverit Selan NRP 31060402780784 Ta Provost Rem 133/Nwb (ex Siswa Diktuba Reg. TA. 2019) tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 1 Mei 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 7 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk Desa Pondang Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP 31060402780784 jabatan Siswa Diktuba Reg. Rindam XIII/Mdk Nosis 024 sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk Desa Pondang Kec. AMurang Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tanpa ijin yang sah dari Komandan Sekolah Calon Secaba atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Lemdik Secaba Rindam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan Sekolah Calon Bintara atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ingin menghadiri pemakaman adik kandungnya yang meninggal dunia di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.



4. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan Sekolah Calon Bintara atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon kepada pihak Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan Sekolah Calon Bintara atau atasan lain yang berwenang, pihak Lemdik Secaba Rindam XIII/Mdk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Amurang Kab. Minahasa Selatan, di Kota Manado dan di Kota Bitung namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan Sekolah Calon Bintara atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2019/ldik tanggal 22 November 2019 atau selama 206 (dua ratus enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Lemdik Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Sekolah Calon Bintara atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan perang baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer maupun perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Supra Tuny (Saksi-1) dan Serka Dedi Darmawan Mukmin (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : SUPRA TUNY
Pangkat/NRP : Serka/21050243310484
Jabatan : Bamin Kisis Bela Negara
Kesatuan : Secaba Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Waiheru (Ambon), 9 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Secaba Rindam XIII/Mdk, Desa Pondang Kec. AMurang Kab. Minahasa Selatan

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba Reg. Ta. 2019 sejak bulan April 2019 di Secaba Rindam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah satu tahun bertugas sebagai Bintara Pelatih di Secaba Rindam XIII/Mdk.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk tanpa ijin dari Komandan Sekolah Calon Bintara sejak tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wita.
4. Bahwa Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk TA. 2019 dibuka pada tanggal 28 April 2019, Terdakwa dengan Nosis 024 kelas A Peleton I Kompi dan ditutup pada tanggal 29 Juli 2019.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wita saat apel pengecekan ibadah subuh Ketua Senat Siswa atas nama Ridwan melaporkan bahwa Siswa 024 atas nama Terdakwa tidak di tempat.
6. Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan benar Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi melapor kepada Perwira Pengawas atas nama Pelda Sukirno, selanjutnya Pelda Sukirno melaporkan kepada Komandan Secaba.
7. Bahwa Saksi diperintahkan Dansecaba untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi handphone Terdakwa, dan dijawab Terdakwa akan berangkat ke NTT untuk menghadiri pemakaman adiknya, tetapi ketinggalan pesawat dan Terdakwa mengatakan akan kembali setelah cara penghiburan di Manado sekitar jam 14.00 Wita.

Hal 11 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada pukul 14.00 Wita Saksi kembali menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan pulang ke kampungnya di NTT dengan kapal laut dan tidak usah dicari lagi karena sudah tidak berkeinginan menjadi tentara lagi.
9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk, karena tidak diberikan ijin Dansecaba Rindam XIII/Mdk untuk menghadiri pemakaman adik kandungnya yang meninggal di NTT.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama mengikuti pendidikan Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
11. Bahwa Dansecaba Rindam XIII/Mdk memerintahkan Sertu Ilham dan Kopka Rifai untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bitung, Bandara Sam Ratulangi Manado, tetapi sampai sekarang belum ditemukan.
12. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
13. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama Lengkap : DEDI DARMAWAN MUKMIN
Pangkat/NRP : Serka/21070502680187
Jabatan : Baton Kisis Secaba
Kesatuan : Secaba Reg. Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Unaaha, 20 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 12 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Secaba Reg. Rindam
XII/Mdk Kab. Minahasa
Selatan Prov. Sulawesi Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh
Oditur Militer adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba Reg. Ta. 2019 sejak bulan April 2019 di Secaba Rindam XIII/Mdk dan Saksi sebagai Ba Kelas Terdakwa di peleton I Kompi A dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat meninggalkan Lembaga pendidikan Terdakwa masih berstatus sebagai Siswa Diktukba Reg Rindam XIII/Mdk, dimana pendidikan dibukan tanggal 28 April 2019 dan ditutup tanggal 29 Juni 2019.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk tanpa ijin dari Komandan Sekolah Calon Bintara sejak tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wita.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wita saat apel pengecekan ibadah subuh.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton Pelati dan kami langsung melakukan pencarian di sekitaran Kota Amurang Manado dan Bitung, namun tidak ditemukan sampai sekarang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Lembaga Pendidikan Secaba Rindam XIII/Mdk, karena adik kandungnya meninggal di Kupang Provinsi NTT.

Hal 13 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama mengikuti pendidikan Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 133/Nwb (ex Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk) dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060402780784.

2. Bahwa Terdakwa Kopda Julianus Soverit Selan NRP 31060402780784 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrem 133/Nwb Nomor B/885/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kelas Ahmad Yani Siswa Diktuba bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, No. urut 24 atas nama Julianus Soverit Selan, Kopda NRP 31060402780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansecaba, Arif Harianto, Letnan Kolonel Inf NRP 11000030680577.

Hal 14 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan terakhir ditulis DIS yang berarti Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Hal 15 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Rem 133/Nwb (ex Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk) dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060402780784.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wita saat apel pengecekan sholat subuh oleh Senat Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk TA. 2019, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 16 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Serka Supra Tuny (Saksi-1) selaku Bintara Pelatih melaporkan kepada Perwira Pengawas (Pelda Sukirno), selanjutnya Pelda Sukirno melaporkan kepada Komandan Secaba.
4. Bahwa benar atas perintah Dansecaba Rindam XIII/Mdk, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan dijawab Terdakwa akan berangkat ke Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri pemakaman adiknya, tetapi ketinggalan pesawat selanjutnya Terdakwa akan kembali setelah acara penghiburan di Manado sekitar jam 14.00 Wita.
5. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wita Saksi-1 kembali menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan akan pulang ke NTT dan tidak perlu dicari lagi karena Terdakwa tidak berkeinginan menjadi prajurit lagi.
6. Bahwa benar Rindam XIII/Mdk telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Amurang Kabupaten Minahasa Utara, namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Danrimdam XIII/Mdk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, karena ingin menghadiri pemakaman adik kandungnya yang meninggal di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal 17 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kelas Ahmad Yani Siswa Diktuba bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, Nomor urut 24 atas nama Julianus Soverit Selan, Kopda NRP 31060402780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansecaba, Arif Harianto, Letnan Kolonel Inf NRP 11000030680577, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
9. Bahwa benar pada tanggal 22 Novemembr 2019 kesatuan Rindam XIII/Mdk telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 18 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 November 2019 atau selama 206 (dua ratus enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 19 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Hal 20 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Rem 133/Nwb (ex Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk) dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060402780784.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/40/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31060402780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.



3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wita saat apel pengecekan sholat subuh oleh Senat Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk TA. 2019, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Serka Supra Tuny (Saksi-1) selaku Bintara Pelatih melaporkan kepada Perwira Pengawas (Pelda Sukirno), selanjutnya Pelda Sukirno melaporkan kepada Komandan Secaba.
3. Bahwa benar atas perintah Dansecaba Rindam XIII/Mdk, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan dijawab Terdakwa akan berangkat ke Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri pemakaman adiknya, tetapi ketinggalan pesawat selanjutnya Terdakwa akan kembali setelah acara penghiburan di Manado sekitar jam 14.00 Wita.
4. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wita Saksi-1 kembali menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan akan pulang ke NTT dan tidak perlu dicari lagi karena Terdakwa tidak berkeinginan menjadi prajurit lagi.
5. Bahwa benar Rindam XIII/Mdk telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Amurang Kabupaten Minahasa Utara, namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Danrimdam XIII/Mdk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, karena ingin menghadiri pemakaman adik kandungnya yang meninggal di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal 23 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kelas Ahmad Yani Siswa Diktuba bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, Nomor urut 24 atas nama Julianus Soverit Selan, Kopda NRP 31060402780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansecaba, Arif Harianto, Letnan Kolonel Inf NRP 11000030680577, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
8. Bahwa benar pada tanggal 22 Novemembr 2019 kesatuan Rindam XIII/Mdk telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 24 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam XIII/Mdk pada tanggal 22 Novemeber 2019 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Rindam XIII/Mdk, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Rindam XIII/Mdk dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “Dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 November 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 November 2019, Terdakwa maupun kesatuan Rindam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 November 2019 atau selama 206 (dua ratus enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 206 (dua ratus enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 26 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 27 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap dan mental yang baik, sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rindam XIII/Mdk dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk.

Hal 28 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 24 Juni 2020 atau selama lebih kurang 420 (empat ratus dua puluh) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 29 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 1 Mei 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 24 Juni 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kelas Ahmad Yani Siswa Diktuba bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, No. urut 24 atas nama Julianus Soverit Selan, Kopda NRP 31060402780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansecaba, Arif Harianto, Letnan Kolonel Inf NRP 11000030680577.

Hal 30 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **JULIANUS SOVERIT SELAN**, Kopda, NRP 310604022780784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kelas Ahmad Yani Siswa Diktuba bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, No. urut 24 atas nama Julianus Soverit Selan, Kopda NRP 310604022780784, Jabatan Siswa Diktukba Reg. Rindam XIII/Mdk, Kesatuan Rindam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansecaba, Arif Harianto, Letnan Kolonel Inf NRP 11000030680577, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 31 dari 32 hlm Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985